

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

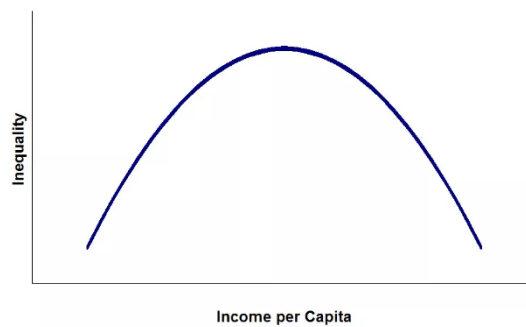
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro & Smith (2006), ketimpangan pendapatan merupakan ketika ada perbedaan dalam pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat, yang menyebabkan distribusi pendapatan nasional tidak merata di antara masyarakat. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan banyak hal, seperti: ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mengganggu perekonomian, ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mengganggu keseimbangan sosial dan persatuan serta ketidakadilan.

Menurut syafrizal (dalam Novia & Utomo, 2022) menyatakan bahwa kegiatan ekonomi suatu daerah sering mengalami ketimpangan atau kesenjangan antar daerah. Ada perbedaan dalam sumber daya alam dan demografi di masing-masing wilayah yang menyebabkan ketimpangan ini pada awalnya. Dengan perbedaan ini, dalam proses pembangunan suatu wilayah, biasanya ada wilayah yang relatif maju dan wilayah yang relatif terbelakang. Wilayah yang relatif maju umumnya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sedangkan wilayah yang relatif tertinggal cenderung dalam hal akses ke sumber daya dan pendidikan.

Menurut hipotesis neo-klasik berpendapat bahwa pada tahap awal pembangunan suatu negara, perbedaan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Sampai ketimpangan mencapai puncaknya, proses ini akan berlanjut.

Setelah itu, perbedaan pembangunan antar wilayah akan berkurang secara bertahap jika pembangunan terus berlanjut. Kurva dari ketimpangan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik (Hendarmin, 2019).



Sumber: thoughtco

Gambar 2. 1 Kurva Kuznets

Menurut Kuznets (dalam Rambey, 2018) distribusi pendapatan cenderung bertambah besar pada tahap awal pembangunan, tetapi menurun kemudian pada tahap pembangunan selanjutnya. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi seringkali menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan teknologi. Namun, seiring dengan kemajuan pembangunan, kebijakan redistribusi pendapatan dan akses yang lebih merata terhadap pendidikan serta peluang ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung menurun.

2.1.1.1 Indikator Ketimpangan Pendapatan

Terdapat berbagai metode untuk mengukur ketimpangan pendapatan dua diantaranya yang paling umum digunakan yaitu:

1. Koefisien Gini

Koefisien gini adalah salah satu alat ukur yang paling digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan wilayah. Koefisien gini yang mendekati 0 berarti distribusi pendapatan yang lebih merata, sedangkan koefisien gini yang mendekati 1 berarti menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih timpang. Dengan kata lain, koefisien gini sebesar 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan sebaliknya koefisien gini sebesar 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang mengukur atau membandingkan distribusi variabel tertentu seperti pendapatan dengan distribusi seragam yang mewakili persentase pada penduduk (Syahri & Gustiara, 2020).

Tabel 2. 1 Kategori Ketimpangan Pendapatan

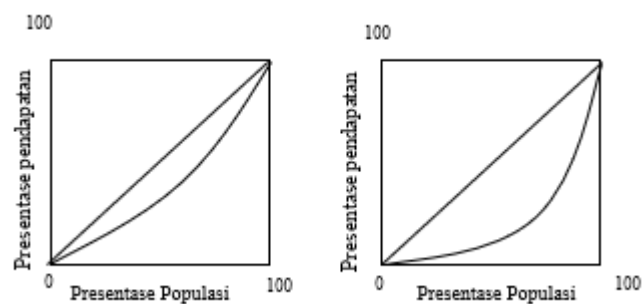
Nilai	Keterangan
$< 0,4$	Tingkat ketimpangan rendah
$0,4-0,5$	Tingkat ketimpangan sedang
$> 0,5$	Tingkat ketimpangan tinggi

2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah sebuah kurva yang menggambarkan fungsi dari distribusi pendapatan kumulatif yang dibentuk seperti bujur sangkar dengan sisi tegak yang menunjukkan persentase kumulatif pendapatan nasional dan sisi dasar yang menunjukkan persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz yang semakin mendekati diagonal atau lebih lurus, menunjukkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sedangkan, jika kurva Lorenz yang semakin jauh dari

diagonal atau lebih lengkung, maka menunjukkan kondisi yang semakin tidak merata (Janah, 2022).

Hubungan kuantitatif dan aktual antara persentase pendapatan yang diterima dan pendapatan secara keseluruhan ditunjukkan oleh kurva Lorenz. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal atau pemerataan sempurna, semakin besar derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Situasi yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna ditunjukkan oleh berimpitnya dengan sumbu horizontal di bagian bawah dan sumbu vertikal di sebelah kanan (Bhagaskara, 2023).



Sumber: Ruang Guru

Gambar 2. 2 Kurva Lorenz

2.1.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Menurut Sjafrizal (dalam Hendarmin, 2019) ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar wilayah yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan kandungan sumber daya alam.
2. Perbedaan kondisi demografis.
3. Kurangnya akses mobilitas barang dan jasa.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.
5. Daerah yang mendapatkan alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta ke daerahnya akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan *output* perkapita dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan karena proses ini dinamis dan kondisinya dapat berubah-ubah (Boediono, 2018). Jadi, pertumbuhan ekonomi bukanlah sesuatu yang terjadi secara statis, tetapi melainkan sebuah proses yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Unsur dinamisnya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti investasi dan tenaga kerja dapat berubah-ubah dan berdampak pada hasil jangka panjang. Dengan kata lain, proses pertumbuhan ekonomi melibatkan perkembangan yang berkelanjutan dan beradaptasi dengan kondisi yang berbeda dari waktu ke waktu.

Menurut Sukirno (dalam Wahyuni & Andriyani, 2022), pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang digambarkan sebagai persentase kenaikan pendapatan nasional riil dalam suatu tahun dibandingkan dibandingkan dengan pendapatan nasional riil sebelumnya. Kegiatan ekonomi yang berkembang dari waktu ke waktu menyebabkan pendapatan nasional terus berubah. Pendapatan nasional merupakan ukuran total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Persentase kenaikan pendapatan menunjukkan seberapa besar perekonomian suatu negara bertambah atau berkurang dalam periode tertentu.

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Robert Solow mengatakan proses pertumbuhan ekonomi terdiri dari empat faktor utama, yaitu manusia, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output yang saling berinteraksi. Jadi, dari empat faktor tersebut akan meningkatkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan produk dan layanan yang lebih banyak dan juga berkualitas.

2.1.3 Penanaman Modal Asing

Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan atau daerah tertentu, dan dapat berasal dari dalam maupun luar negeri yang dapat meningkatkan kemampuan produksi suatu wilayah. Penambahan investasi, akan meningkatkan jumlah produksi, sehingga meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa (Royan et al., 2019). Sedangkan menurut Sukirno (dalam Bhagaskara, 2023) investasi adalah penanaman modal atau pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli barang dan perlengkapan produksi yang dapat membantu perusahaan memproduksi barang dan jasa.

Investasi dari luar negeri atau penanaman modal asing adalah salah satu cara bagi sebuah negara untuk berkembang dengan melalui investasi asing langsung dari luar negeri ke Indonesia untuk meningkatkan modal dan produktivitas sehingga dapat dicapai melalui investasi (Mankiw, 2006). Dengan adanya investasi asing, perusahaan dalam negeri dapat memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber daya keuangan yang lebih besar dan ini ini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, infrastruktur dan pengembangan produk baru.

Dalam teori penanaman modal, Harrod-Domar menyatakan bahwa penanaman atau modal penanaman diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang

baik. Aktivitas pendanaan dapat membantu meningkatkan permintaan masyarakat, karena mereka dapat membuat barang dan layanan untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, aktivitas pendanaan baru dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pengaruh penanaman modal pada pertumbuhan ekonomi akan terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun, situasi ini tidak akan terjadi ketika modalnya di investasikan di daerah tertentu saja (Arsyad, 1997).

2.1.4 Upah Minimum Provinsi

Upah secara ekonomi didefinisikan sebagai jumlah yang harus diberikan oleh perusahaan atau lembaga kepada pekerja sebagai kompensasi atas waktu dan tenaga yang mereka habiskan untuk menyelesaikan tugas produksi (Katon Prasetyo Wibowo & Pangestuty, 2023). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 7 Tahun 2013, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Tujuan utama dilakukannya penetapan upah yaitu untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah untuk memastikan bahwa pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi disebut dengan upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Upah minimum provinsi berfungsi sebagai standar upah terendah yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja di semua sektor, sehingga diharapkan dapat mencegah pekerja dieksploitasi dan memastikan bahwa gaji mereka tetap stabil. Selain itu, upah minimum provinsi diharapkan dapat meningkatkan daya beli

pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta mengurangi kesenjangan sosial.

Teori efisiensi upah menurut Mankiw (dalam Bhagaskara, 2023) menjelaskan bahwa upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitas pekerja dengan melalui beberapa mekanisme:

1. Kesehatan pekerja yaitu dengan pekerja yang sehat akan cenderung lebih produktif.
2. Mengurangi perputaran tenaga kerja yaitu perusahaan dapat mengurangi tingkat *turnover* karyawan dengan menawarkan upah yang kompetitif.
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu upah lebih tinggi dapat menarik pekerja dengan kualitas lebih tinggi dan mempertahankan pekerja yang berprestasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas rata-rata tenaga kerja dalam perusahaan.
4. Kerja keras pekerja yaitu pekerja yang menerima upah lebih besar mungkin akan termotivasi untuk bekerja lebih keras, terutama jika pekerja mendapat upah yang diterima sebagai penghargaan atas usahanya. Sehingga ini dapat meningkatkan *output* dan efisiensi perusahaan.

2.1.5 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah setiap semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap (BPS, 2023).

Negara seharusnya dapat memanfaatkan pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan perekonomiannya. Menurut Mankiw (dalam Al Aqilah et al., 2024) hal ini sebanding dengan gagasan fungsi produksi yang diperkenalkan oleh Cobb-Douglas, yang berasumsi bahwa kombinasi modal dan tenaga kerja memengaruhi *output*.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, potensi pasar tenaga kerja dan konsumsi sering dikaitkan dengan jumlah penduduk. Wilayah dengan jumlah penduduk yang besar memiliki banyak tenaga kerja, yang dapat meningkatkan produktivitas jika didukung oleh investasi yang tepat dan kebijakan yang efektif. Namun, peningkatan jumlah penduduk dapat menimbulkan tantangan untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai apabila sumber daya dan infrastruktur tidak mencukupi.

2.1.6 Kajian Empiris

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinda Syahri, Yesy Gustiara, (2020), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan	Variabel independen: pertumbuhan ekonomi	Variabel independen: kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif tidak	<i>Journal of Trends Economics and Accounting Research</i> , Vol. 1, No. 1.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendapatan di Sumatera Periode 2015-2019.			signifikan.	
2	Sri Wahyuni, Devi Andriyani, (2022), Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh	Variabel independen: jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi	Variabel independen: inflasi	Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan, jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan.	Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol. 5, No. 1, E-ISSN: 2615-126X.
3	Siti Holijah Harahap, (2022), Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Variabel independen: pertumbuhan ekonomi	Variabel independen: investasi, IPM	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan, investasi berpengaruh negatif tidak signifikan dan IPM berpengaruh positif signifikan.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11, No. 3, E-ISSN: 2654-5837.
4	Karimi, Mulyani, Murialti, Tibrani, (2023), Pengaruh PMA, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran dan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	Variabel independen: PMA	Variabel independen: Indeks persepsi korupsi, kemiskinan, pengangguran upah minimum	PMA, persepsi korupsi, kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh positif signifikan sedangkan upah minimum berpengaruh negatif signifikan.	Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, Vol. 13, No. 1.
5	Razi Rahman, Dewi Zaini Putri, (2021), Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi,	Variabel independen: pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk	Variabel independen: upah minimum, inflasi	Upah minimum berpengaruh negatif signifikan sedangkan pertumbuhan ekonomi,	Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 3, No. 3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera			jumlah penduduk, dan inflasi berpengaruh positif tidak signifikan.	
6	Yoertiara, Feriyanto, (2022), Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan TPT terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa	Variabel independen: pertumbuhan ekonomi	Variabel independen: indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka	Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif tidak signifikan sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif tidak signifikan.	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No 1.
7	Arfian, (2022), Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara	Variabel independen: jumlah penduduk	Variabel independen: pendidikan, kemiskinan	Jumlah penduduk berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan pendidikan dan kemiskinan berpengaruh negatif signifikan.	Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 2, e-ISSN: 2052-5171.
8	Agra Julihanza dan Rifki Khoirudin, (2023), Determinan Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera	Variabel independen: pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk	Variabel independen: upah minimum, inflasi, investasi	Pertumbuhan ekonomi, investasi berpengaruh negatif tidak signifikan, dan upah minimum berpengaruh signifikan sedangkan jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh positif tidak signifikan.	<i>Journal of Macroeconomics and Social Development</i> , Vol. 1, No. 2.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Royan, Riyanto dan Nuraini, (2019), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi NTB	Variabel independen: pertumbuhan ekonomi	Variabel independen: investasi	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan sedangkan investasi berpengaruh positif tidak signifikan.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), Vol. 3, No. 3.
10	Wibowo dan Pangestuty, (2023), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	Variabel independen: upah minimum provinsi	Variabel independen: PDRB, produktivitas tenaga kerja, investasi	UMP dan produktivitas berpengaruh negatif signifikan sedangkan PDRB berpengaruh positif tidak signifikan dan investasi berpengaruh positif signifikan.	<i>Journal of Development Economic and Social Studies</i> , Vol. 2, No. 3.
11	Astary, Safitri, Zarpani dan Harahap, (2024), Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi dan Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	Variabel independen: upah minimum provinsi	Variabel independen: investasi, pengeluaran pemerintah, inflasi	Investasi, upah minimum provinsi dan inflasi berpengaruh positif signifikan sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan.	Menara Ekonomi, Vol. X, No. 1, E-ISSN: 2579-5295.
12	Pasoman dan Maria, (2024), Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2015-2022	Variabel independen: jumlah penduduk, UMP	Variabel independen: PDRB, pengangguran, IPM	PDRB berpengaruh positif tidak signifikan, pengangguran dan IPM berpengaruh positif signifikan sedangkan	<i>Business Economic Entrepreneurship</i> , Vol. VII, No. 2, E-ISSN: 2714-9986.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				jumlah penduduk berpengaruh negatif tidak signifikan dan UMP berpengaruh negatif signifikan.	
13	Miftahul Janah, (2022), Analisis Pengaruh Tingkat PDRB, IPM, dan PMA terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2019-2021	Variabel independen: PMA	Variabel independen: PDRB, IPM	PDRB dan PMA berpengaruh negatif signifikan sedangkan IPM berpengaruh positif signifikan.	Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 1, No. 4, E-ISSN: 2963-5292.
14	Violin dan Lutfi, (2022), Analisis Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa	Variabel independen: pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk	Variabel independen: IPM	Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan sedangkan IPM berpengaruh positif tidak signifikan.	Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 2, No. 1, e-ISSN: 2339-0840.
15	Al Muchtar dan Sihombing, (2024), Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera	Variabel independen: jumlah penduduk, upah minimum provinsi	Variabel independen: indeks pemberdayaan gender, PDRB, penduduk miskin	Jumlah penduduk dan upah minimum provinsi berpengaruh negatif signifikan, PDRB dan penduduk miskin berpengaruh positif signifikan sedangkan indeks pemberdayaan gender berpengaruh	<i>Journal of Law, Administration, and Social Science</i> , Vol. 4, No. 1.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				positif signifikan.	tidak

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, upah minimum provinsi, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.1 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan per kapita. Namun, ternyata manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak selalu terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat yang sering menyebabkan ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung pemerataan sehingga ketimpangan pendapatan menjadi meningkat.

Teori Kuznets dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan akan meningkat karena distribusi pendapatan yang belum merata. Hal ini karena sebagian besar keuntungan ekonomi terjadi pada sektor-sektor modern yang berada di daerah perkotaan, sedangkan sektor tradisional yang berada di pedesaan tertinggal. Namun, setelah pemerataan

mencapai tingkat yang lebih tinggi, ketimpangan akan menurun (Helmy et al., 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Aisyah (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan ini karena pertumbuhan ekonomi tidak dimanfaatkan untuk program penanggulangan kemiskinan seperti pemberian modal agar masyarakat miskin dapat memulai usaha sendiri seperti UMKM.

2.2.2 Hubungan Penanaman Modal Asing dengan Ketimpangan Pendapatan

Penanaman modal asing memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, terutama di negara berkembang karena dapat membawa investasi, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, penanaman modal asing dapat berdampak meningkatkan ketimpangan pendapatan karena investasi yang dilakukan hanya berfokus pada daerah-daerah yang sudah maju, sehingga daerah yang kurang berkembang tertinggal.

Menurut teori pergerakan modal internasional, ada dua jenis modal internasional yaitu investasi langsung dan investasi dalam sekuritas. Suatu negara dapat menurunkan jumlah impor dan meningkatkan output manufaktur yang berorientasi ekspor dengan investasi asing. Sebagai komponen penting dari globalisasi, investasi asing ini memiliki kemungkinan memengaruhi ketimpangan pendapatan negara tuan rumah (Rezk et al., 2022).

Teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah dapat dipicu oleh perbedaan tingkat investasi dan distribusi modal di berbagai daerah. Wilayah yang menerima investasi lebih banyak cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, sementara wilayah lainnya tertinggal dalam hal pembangunan dan pendapatan per kapita. Investasi dianggap lebih menguntungkan jika dialokasikan ke daerah-daerah yang dapat menghasilkan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat (Wijayanti & Aisyah, 2022).

Menurut penelitian oleh Karimi et al. (2023) menyatakan penanaman modal asing berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penanaman modal asing berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan ini karena penanaman modal asing hanya menguntungkan wilayah tertentu, sehingga distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata.

2.2.3 Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Ketimpangan Pendapatan

Upah minimum provinsi bertujuan untuk melindungi pekerja dengan upah batas minimum yang harus dilaksanakan oleh pengusaha. Di satu sisi, upah minimum provinsi dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan memastikan bahwa pekerja dengan upah rendah mendapatkan kompensasi yang layak. Namun, upah minimum provinsi ternyata dapat terjadinya ketimpangan pendapatan disebabkan oleh peningkatan upah minimum provinsi yang hanya berlaku bagi pekerja di sektor formal sedangkan pekerja di sektor informal tidak berlaku bagi pekerja di sektor formal sedangkan pekerja di sektor informal tidak memperoleh manfaat yang sama. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan yang lebih besar.

Teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum dapat meningkatkan daripada mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah berperan dalam menetapkan standar upah minimum di pasar tenaga kerja. Dengan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka biaya produksi perusahaan akan meningkat yang pada gilirannya akan menyebabkan harga produk naik. Akibatnya, peningkatan harga produk dapat mengurangi daya beli masyarakat yang justru dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Menurut penelitian oleh Astary et al. (2024) menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan ini karena adanya tenaga kerja yang tidak menerima upah sesuai dengan upah minimum provinsi atau merupakan pekerja informal.

2.2.4 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Ketimpangan Pendapatan

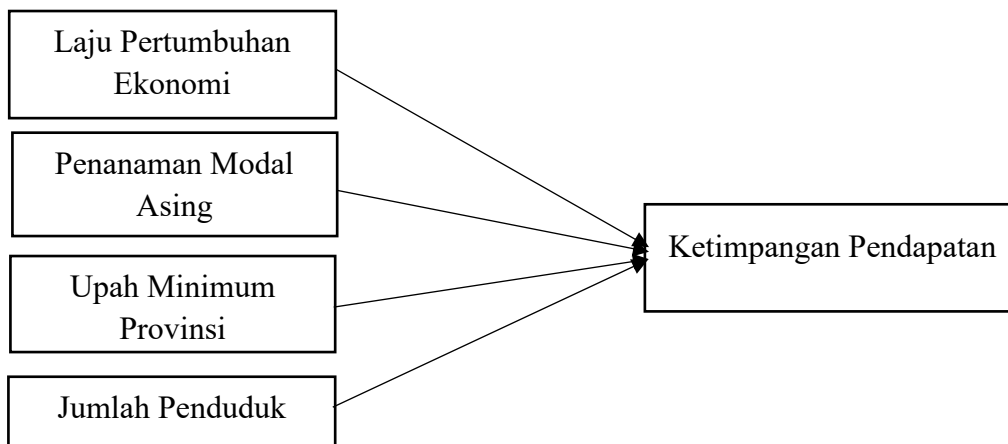
Secara teori, peningkatan jumlah penduduk dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan karena distribusi sumber daya dan peluang ekonomi yang tidak merata. Peningkatan jumlah tenaga kerja dapat menjadi tantangan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai dan pendapatan yang layak bagi seluruh wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang cepat. Jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran maka akan berakibat pada ketimpangan pendapatan (Firdaus & Indira Hasmarini, 2023).

Teori Malthusian berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menghambat peningkatan kesejahteraan ekonomi, karena peningkatan jumlah

penduduk tidak sejalan dengan peningkatan sumber daya yang tersedia. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dapat memperbesar kesenjangan, karena peluang ekonomi dan sumber daya sering kali menjadi lebih terbatas.

Menurut penelitian oleh Rizkia & Andriyani (2022) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam serta lapangan usaha yang tersedia sering kali tidak memadai, sehingga pendapatan masyarakat tidak merata.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Dalam penelitian ini, penulis

berasumsi bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

1. Diduga secara parsial laju pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, upah minimum provinsi, dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan enam provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2023.
2. Diduga secara simultan laju pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, upah minimum provinsi, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan enam provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2023.